

RENCANA KERJA OPD TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOMBANA
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana Tahun 2022.

Rencana Kerja DPMD Kabupaten Bombana Tahun 2022 sebagai pelaksanaan tahun ke 5 dari Rencana Strategis DPMD Tahun 2017-2022, yang merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan DPMD untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengawasan pemerintahan desa dan pemberdayaan perempuan.

Rumbia, Februari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,**



M. HADI RAHARJO PUTRA, S. IP

Pembina, IV/a

NIP. 198609072007011001

DAFTAR ISI**HAL :**

KATA		i
PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		
	PENDAHULUAN	1
BAB. I	1.1.Larat Belakang	1
	1.2.Landasan Hukum	2
	1.3.Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Bombana	3
	1.4.Sistematika Penulisan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Bombana	3
	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020	6
BAB. II	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Bombana Tahun 2019 dan Capaian Renstra	6
	2.2. Analisa Kinerja Pelayanan DPMD	6
	2.3. Isu-Isu Penting Pelanggaran Tugas dan Fungsi DPMD	9
	2.4. Penelaahan Usulan Progran dan Kegiatan Masyarakat	10
	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	11
BAB. III	3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	11
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD	11
	3.3. Program dan Kegiatan	12
	PENUTUP	13
BAB. IV	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	- Bagan Struktur Organisasi DPMD Tahun 2021	I
	- Rekapitulasi hasil Evaluasi Keuangan dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022	II
	- Rekapitulasi hasil Evaluasi Kinerja pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022	III
	- Usulan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	IV
	- Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022	V
	- Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023	VI

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja OPD sebagai penjabaran Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas PMD Kabupaten Bombana menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bombana ke dalam program dan kegiatan Badan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Badan secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bombana.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra OPD yang dilanjutkan dengan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional,

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana tahun 2015 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana Tahun 2012-2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).

16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun dengan kabupaten/kota serta bidang-bidang pada DPMD Kabupaten Bombana sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah :

1. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar lembaga pemerintahan maupun antar bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil program dan kegiatan;
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD,

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator

yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten / Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. lanjut.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DPMD

Evaluasi terhadap Renja DPMD Kabupaten Bombana Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/ kegiatan, pelaksanaan rencana program/ kegiatan serta hasil rencana program/ kegiatan.

Dalam penyusunan Renja DPMD Kabupaten Bombana Tahun 2022, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja DPMD Kabupaten Bombana Tahun 2022, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Bombana Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel 2.1 sebagaimana lampiran dari dokumen Renja ini.

Dari tabel 2.1 tersebut, terlihat bahwa capaian pelaksanaan program kerja DPMD Kabupaten Bombana Tahun 2021 terealisasi sampai mencapai 90 persen.

Sehubungan dengan hal diatas, pengelolaan program/ kegiatan dan pembinaan SDM pada DPMD harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Renja DPMD tahun 2022 dan tahun 2023 dapat tercapai 100 persen.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPMD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Pembina dan Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan daerah di bidang pemerintahan desa
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa
- e. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- f. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, serta batas desa
- g. Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa
- h. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD
- i. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- j. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat
- l. Pembinaan dan supervise pemanfaatan teknologi tepat guna
- m. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten
- n. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bombana.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sekretaris
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- b. Jabatan Fungsional Umum
 - c. Jabatan Fungsional Umum
 - d. Jabatan Fungsional Umum
4. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:
- a. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 - b. Jabatan Fungsional Umum
 - c. Jabatan Fungsional Umum
 - d. Jabatan Fungsional Umum

Bagan Struktur Organisasi sebagai tertuang dalam bagan 2.1 sebagaimana terlampir.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode Tahun 2017 – 2022, DPMD memiliki tantangan untuk membantu Bupati Bombana dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pembangunan perdesaan. Untuk dapat terciptanya misi tersebut diatas maka peran serta DPMD dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan menuju desa mandiri desa mandiri harus kami tingkatkan. Selain itu untuk pengembangan pelayanan terhadap masyarakat DPMD akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan keuangan perdesaan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program / kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DPMD Kabupaten Bombana ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Bombana selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2 dan tabel 2.3 sebagaimana terlampir.

Rata – rata pencapaian target kinerja OPD DPMD Kabupaten Bombana pada Tahun 2022 berada pada kisaran 95,19 persen atau dengan kata lain berkinerja BAIK.

2. 2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikatakan hasilnya cukup baik walaupun ada beberapa kegiatan belum mencapai hasil yang ditargetkan.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan menuju desa mandiri yang dapat dioperasikan, DPMD Kabupaten Bombana menghadapi permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. kurangnya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
2. Keterbatasan personil pendukung dan sumber daya ASN Dinas PMD
3. Keterbatasan anggaran biaya untuk pelatihan-pelatihan dan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
4. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pemerintahan desa
5. Lemahnya koordinasi antar sektor maupun antar stakeholder
6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang
7. Kemampuan Sumber Daya Manusia di tingkat desa yang masih terbatas;
8. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
9. Tidak terintegrasinya pola pemberdayaan masyarakat baik dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa maupun kelurahan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMD dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh DPMD Kabupaten Bombana pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat pemerintahan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.

2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai peraturan perundang– undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
 - c. Mewujudkan perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada DPMD dalam rangka mewujudkan *good governace* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas rencana program kegiatan di bidang
 - Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat;
 - Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - Peningkatan Manajemen Pelaksanaan Pemerintahan Desa.
4. Strategi peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di perdesaan melalui pembinaan tim penggerak PKK di tingkat kecamatan dan desa maupun kelurahan, serta pembinaan kelompok-kelompok dasawisma.
5. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program kegiatan sesuai dengan kebijakan publik dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bombana dan DPMD Kabupaten Bombana.

2.3. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD DPMD Kabupaten Bombana Tahun 2022, sudah mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif dengan penerapan teknologi tepat guna.

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bombana, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara, RPJM Provinsi Sulawesi Tenggara, RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara; dan RKPD Kabupaten Bombana 2022.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMD

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, DPMD menentukan Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja DPMD Kabupaten Bombana Tahun 2022, untuk program dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah berskala desa
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pengembangan inovasi desa dan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat desa
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa menuju kualitas pelayanan masyarakat yang prima
5. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra dalam pembangunan masyarakat

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka DPMD menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah berskala desa

3. Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui pengembangan inovasi desa dan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat desa
4. Berkembangnya Produk Unggulan Desa
5. Meningkatnya peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat desa
6. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa menuju kualitas pelayanan masyarakat yang prima
7. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra dalam pembangunan masyarakat
8. Tersedianya Gedung / Sarana Pendidikan Usia Dini
9. Meningkatnya Bantuan stimulan prasarana utilitas umum di Desa
10. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar di Desa

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran DPMD Kabupaten Bombana tidak terlepas pada kebijakan umum Kabupaten Bombana melalui berbagai program antara lain :

- Program Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Program Penguatan dan Kelembagaan Masyarakat
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
- Program Pelayanan Administrasi perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur dan Keuangan
- Program Peningkatan Sistem Perencanaan OPD

Program prioritas yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan harus dititik beratkan pada upaya meningkatkan kinerja pembangunan desa. Peningkatan kinerja pembangunan desa harus berorientasi pada penguatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan kapasitas keuangan desa, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi pembangunan, peningkatan ekonomi perdesaan, peningkatan usaha pelestarian lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kualitas kerja, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan adat dan sosial budaya.

Adapun rencana program dan kegiatan DPMD tahun 2022 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 terlampir.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana yang berisi prioritas program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMD Kabupaten Bombana sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Rumbia, Februari 2023

Kepala DPMD
Kabupaten Bombana.

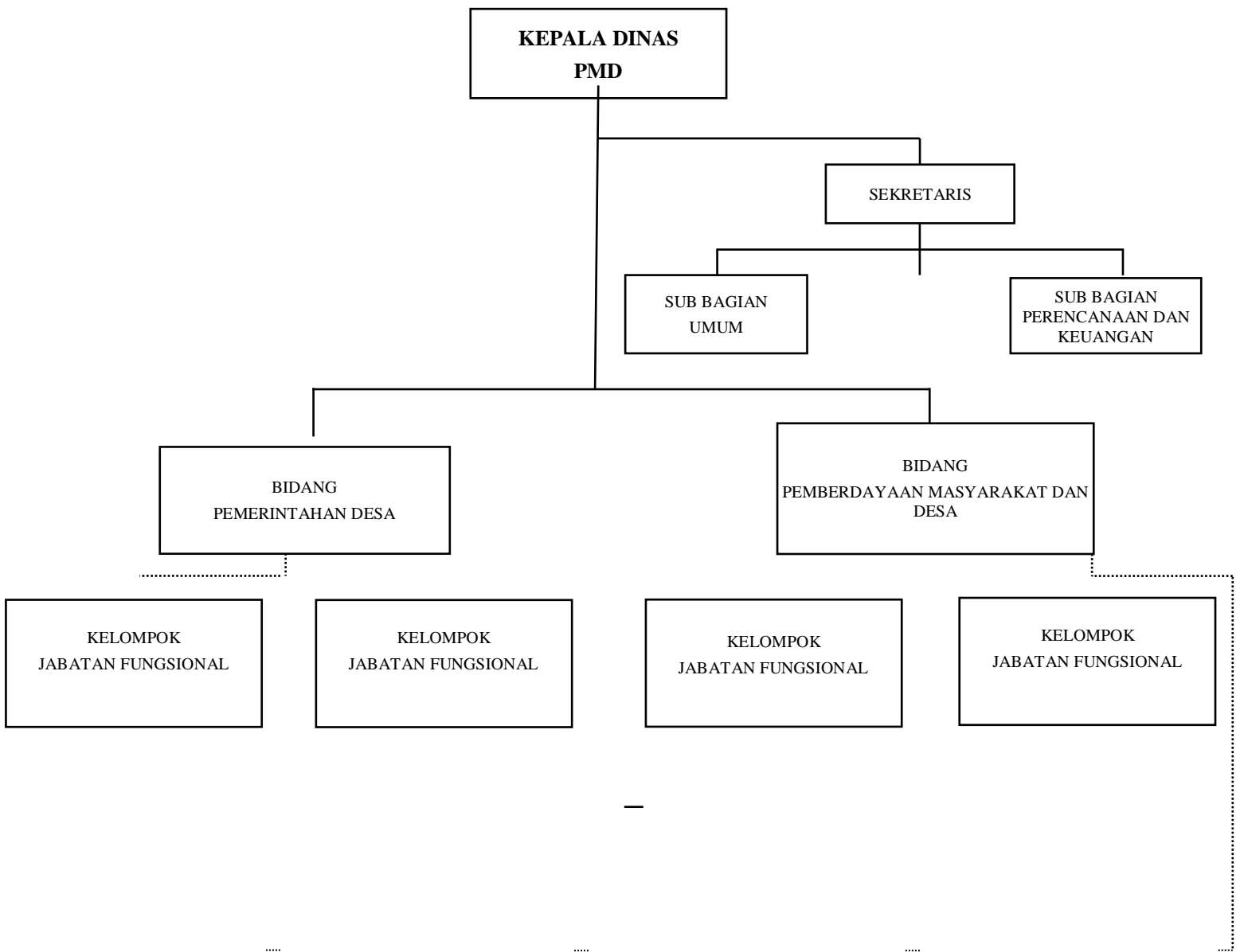


M. HADI RAHARJO PUTRA, S.IP

Pembina, IV/a

NIP. 19860907 200701 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAANN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOMBANA**



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Realisasi Keuangan OPD dan
Pencapaian Renstra O PD s/d Tahun 2022
Kabupaten Bombana

Nama OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Target program dan kegiatan Tahun 2021	Perkiraan realisasi Keuangan Renstra Tahun 2021		Target program dan kegiatan tahun 2022	Perkiraan realisasi Keuangan Renstra 2022	
			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2021 *)	Tingkat capaian realisasi Target (%) *)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target
1	2	6	7	8			
1.22 01 00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	(709.395.000)	(2.351.026.988)	105,19%			
1.22 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(480.000)	(3.258.500)	81,67%	10.280.000	10.280.000	100%
1.22 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik	(17.460.000)	(50.828.284)	80,87%	22.960.000	14.925.623	65,01%
1.22 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	(16.200.000)	(38.426.336)	89,23%	77.505.000	71.635.045	92,43%
1.22 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	(97.920.000)	(292.460.000)	100,00%			
1.22 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	(31.130.000)	(91.070.000)	99,09%			
1.22 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	(25.000.000)	(96.436.000)	100,17%	-	-	-
1.22 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(8.000.000)	(37.699.800)	101,89%	32.785.850	23.250.000	70,91%
1.22 01 16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	(17.800.000)	(46.875.000)	90,32%	16.800.000	18.800.000	100%
1.22 01 17	Penyediaan bahan logistik Kantor	(-)	(860.000)	53,42%	47.512.500	47.471.600	99,91%
1.22 01 18	Penyediaan Makanan dan Minuman	(56.280.000)	(186.384.000)	99,62%	17.100.000	17.100.000	100%
1.22 01 19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	(210.225.000)	(1.002.289.068)	105,47%	461.437.000	461.437.000	100%
1.22 01 20	Penyediaan Jasa Publikasi	(10.000.000)	(30.000.000)	100,00%	10.000.000	10.000.000	100%
1.22 01 21	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	(218.900.000)	(474.440.000)	122,69%	120.900.000	120.900.000	100%
1.22 02 00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	(225.605.000)	(645.583.622)	98,27%			
1.22 05 01	Pembangunan Gedung Kantor	(25.000.000)	(95.000.000)	79,17%	36.450.000	36.448.000	99,99%
1.22 05 02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	(-)	(1.740.000)	0,00%	6.000.000	6.000.000	100%
1.22 05 02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	(27.000.000)	(27.000.000)	600,00%	6.000.000	6.000.000	100%
1.22 05 03	Pengadaan Mebeleur	(-)	(18.000.000)	0,00%	1.500.000	1.500.000	100%
1.22 05 04	Pengadaan Komputer	(20.000.000)	(33.500.000)	121,82%	47.000.000	47.000.000	100%
1.22 05 05	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	(15.000.000)	(59.499.910)	103,48%			
1.22 05 06	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	(128.005.000)	(377.404.322)	99,47%			
1.22 05 07	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	(5.600.000)	(17.439.890)	155,71%			

1.22	05	08	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	(2.500.000)	(3.499.500)	34,17%			
1.22	05	09	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	(2.500.000)	(12.500.000)	91,91%			
1.22	05	10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	(-)	(-)	0,00%	199.000.000	199.000.000	100%
1.22	12	00	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	(58.000.000)	(116.160.000)	139,68%			
1.22	12	03	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	(58.000.000)	(116.160.000)	139,68%	60.200.000	60.192.000	99,99%
1.22	08	00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	(30.000.000)	(60.000.000)	100,00%			
1.22	08	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(30.000.000)	(60.000.000)	100,00%	40.000.000	40.000.000	100%
1.22	06	00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJ	(21.000.000)	(39.349.500)	59,76%			
1.22	06	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	(16.000.000)	(31.349.500)	56,64%	20.796.000	20.796.000	100%
1.22	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	(2.000.000)	(2.000.000)	80,00%	8.089.950	6.180.000	76,39%
1.22	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	(3.000.000)	(6.000.000)	75,00%	4.283.250	4.200.000	98,06%
1.22	16	00	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN	(20.000.000)	(46.550.000)	93,95%			
1.22	16	01	Pembinaan dan pengawasan lembaga mikro dan usaha ekonomi masyarakat	(20.000.000)	(46.550.000)	93,95%			
1.22	16	02	Pelatihan Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa	(100.000.000)	(150.070.000)	76,42%			
1.22	17	05	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	(-)	(-)	0,00%			
1.22	17	04	Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	(-)	(-)	0%			
1.22	17	09	Penganugerahan SIKOMPAK AWARD KABUPATEN	(-)	(-)	0%			
1.22	20	00	PROGRAM PENGUATAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	(50.000.000)	(50.000.000)	19,84%			
1.22	20	01	Gelar TTG Nasional	(50.000.000)	(50.000.000)	24%			
1.22	20	02	Sayembara/lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat kabupaten	(-)	(-)	0%			
1.11	21	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	(1.005.000.000)	(1.027.700.000)	55,79%			
1.11	21	01	Pembinaan organisasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	(567.362.500)	(567.362.500)	51%	946.403.750	946.113.750	99,65%
1.11	21	04	Pelaksanaan Jambore PKK	(87.637.500)	(87.637.500)	53%	67.285000	67.285000	100%
1.11	21	05	Pembinaan lomba 10 program PKK	(25.000.000)	(25.000.000)	53%	19.850.000	19.850.000	100%
1.11	21	08	Temu Kader PKK Kabupaten (Penguohan PKK)	(-)	(-)	0%	22.500.000	22.500.000	100%
1.11	21	09	Penyelenggaraan PKK Kabupaten (Rakor PKK)	(25.000.000)	(47.700.000)	95%	16.900.000	16.900.000	100%

1.11	21	10	Bimbingan Teknik Anggota PKK	(300.000.000)	(300.000.000)	64%	130.000.000	130.000.000	100%
1.22	22	00	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA	(547.000.000)	(1.272.174.000)	46,70%			
1.22	22	01	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	(-)	(-)	0%			
1.22	22	02	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa	(-)	(-)	0%	59.506.400	59.306.400	99,66%
1.22	22	03	Rapat koordinasi pemerintahan	(90.000.000)	(186.450.000)	71%			
1.22	22	04	Penilaian Tingkat Perkembangan Desa	(92.000.000)	(131.799.500)	189%			
1.22	22	05	Penegasan Tapal Batas Desa	(-)	(-)	0%			
1.22	22	06	Pembinaan implementasi sistem keuangan desa	(140.000.000)	(331.294.500)	74%	169.740.400	154.201.000	90,85%
1.22	22	06	Pelatihan Anggota BPD	(125.000.000)	(275.490.000)	59%			
1.22	22	06	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	(50.000.000)	(176.015.000)	28%	389.755.500	389.657.400	99,97%
1.22	22	06	Pengadaan Buku Administrasi Desa	(-)	(111.925.000)	0%			
1.22	22	06	Pembinaan Lomba Desa	(50.000.000)	(59.200.000)	83%			
1.22	22	00	(-)(-) 0,00%						
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA						
1.22	22	01	Bantuan Pembangunan Kantor Desa	(-)	(-)	0%			
1.22	22	02	Bantuan Pembangunan Balai Desa	(-)	(-)	0%			
1.22	22	03	Bantuan Pembangunan Posyandu	(-)	(-)	0%			
1.22	22	04	Bantuan Pembangunan Gedung PKK	(-)	(-)	0%			
1.22	29	00	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN	(-)	(68.159.995)	113,60%			
1.22	29	01	Penyusunan Renstra OPD/Penyusunan Dokumen Perencanaan	(-)	(68.159.995)	0%	52.076.300	52.022.000	99,90%
1.22	29	01	Penyusunan Renja SKPD/Penyusunan Dokumen RKA	(3.000.000)	(3.000.000)	86%	4.851.800	4.851.800	100%
1.22	29	01	Penyusunan RKA SKPD/Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	(3.000.000)	(3.000.000)	86%	4.851.800	3.600.000	74,20%
JUMLAH				(2.666.000.000)	(5.676.704.105)	69,92%	8.115.029.000	7.960.522.295	98,10%

*) : Data Belum Final, masih diolah

Rumbia, Februari 2022
Mengetahui :
Kepala Dinas PMD Kab. Bombana,



M.HADI RAHARJO PUTRA, S.IP
NIP. 19860907200701 1 001

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022 (Periode Renstra
2017-2022
Kabupaten Bombana

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun s.d 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target s.d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi s.d Tahun 2022(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program pelayanan administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	1200 Lembar	400 Lembar	400 Lembar	400 Lembar	100%	1200 Lembar	1200 Lembar	100%
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	36 Bulan	36 Bulan	100%
1 3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan masa berlaku Surat-surat (STNK) kendaraan dinas/operasional	71 Surat	17 Surat	17 Surat	17 Surat	100%	17 surat	71 Surat	100%
1 4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya insentif untuk Pelaksana Tugas-Tugas administrasi keuangan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	100%
1 5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasakebersihan kantor	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	100%
1 6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor mendukung kelancaran administrasi perkantoran	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	100%
1 7	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	100%
1 8	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jasa media Cetak dan iklan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Bulan	36 Paket	100%
1 9	Penyediaan bahan logistik kantor	Buku peraturan perundang-undangan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	3 Paket	100%
1 10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman harian serta makanan dan minuman tamu	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	100%
1 11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya Anggaran Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	198 Kali	65 Kali	66 Kali	65 Kali	98%	66 kali	198 Kali	68%
1 12	Penyediaan Jasa Publikasi	Persentase program yang dipublikasikan melalui media cetak dan eletronik	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
1 13	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya insentif bagi PHTT	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas								
2 1	Pembangunan gedung kantor	jumlah luasan dinding yang telah di lapiis cat dinding	650 M2	650 M2	0 M2	0 M2	0%	650 M2	650 M2	100%
2 2	pembangunan gedung arsip	jumlah gedung arsip yang dibangun	1 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
2 3	pembuatan teralis pengaman jendela	jumlah jendela yang dipasang teralis pengaman	75 M2	- M2	- M2	- M2	0%	75 M2	75 M2	-
2 4	Pembangunan tempat parkir kendaraan	jumlah tempat parkir yang tersedia	2 Unit	- Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
2 5	Penataan halaman kantor	jumlah luasan halamann kantor yang ditata	400 M2	- M2	- M2	- M2	0%	400 M2	400 M2	-
2 6	pengadaan komputer	Jumlah komputer yang tersedia	3 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	3 Unit	3 Unit	-

2	7		Pengadaan perlengkapan komputer	Jumlah perlengkapan komputer yang tersedia	3 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	3 Unit	3 Unit	100%
2	8		Pengadaan Pendingin Ruangan	Jumlah pendingin ruangan yang disediakan	2 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	2 Unit	2 Unit	-
2	9		Pengadaan Lemari Arsip	Jumlah lemari arsip yang disediakan	4 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	4 Unit	4 Unit	-
2	10		pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	persentase gedung kantor yang terpelihara	100%	50%	0,75 0,5	0,75 0,5	100%	100%	100%	100%
2	11		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100%	50%	0,75 0,5	0,75 0,5	100%	100%	100%	100%
2	12		pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100%	50%	0,75 0,5	0,75 0,5	100%	100%	100%	100%
2	13		pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	100%	50%	0,75 0,5	0,75 0,5	100%	100%	100%	100%
2	14		pemeliharaan rutin/berkala komputer	persentase komputer yang terpelihara	100%	50%	0,75 0,5	0,75 0,5	100%	100%	100%	100%
3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
3	1		pengadaan pakaian dinas harian pegawai	jumlah pakaian dinas harian yang disediakan	192 Set	- Set	- Set	- Set	0%	192 Set	192 Set	-
3	2		pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	192 Set	64 Set	48 Set	64 Set	133%	192 Set	192 Set	100%
4			Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
4	1		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan yang tersusun dengan baik dan benar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan yang tersusun dengan baik dan benar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	3		Penyusunan laporan bulanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan yang tersusun dengan baik dan benar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
5	1		Pelatihan Pelatih Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Pelatih Pelatihan Masyarakat di Dinas PMD	5 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	-	5 Orang	-
5	2		Pelatihan PARALEGAL ASN Dinas PMD	Jumlah Paralegal ASN di Dinas PMD	3 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	-	3 Orang	-
5	3		Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan eselon II, III dan IV	jumlah ASN yang mengikuti DIKLATPIM	4 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	-	4 Orang	-
5	4		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis	6 Orang	2 Orang	- Orang	- Orang	0%	-	6 Orang	-
5	5		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Desa	Jumlah ASN Dinas PMD yang melakukan pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 orang	15 Orang	100%
5	6		Pelatihan Manajemen Organisasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kasi PMD Kecamatan yang mengikuti Pelatihan Manajemen Organisasi Pemerintahan Desa	22 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	-	22 Orang	-
6			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
6	1		Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang mendapat pembinaan persiapan penilaian tingkat perkembangan desa	3 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	100%	1 Desa	3 Desa	100%
6	2		Pelatihan Perencanaan Partisipatif membangun desa	Jumlah Masyarakat yang telah mengikuti Pelatihan	40 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	-	40 Orang	-
6	3		Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah desa yang melakukan BBGRM di tingkat Desa	30 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	100%	20%	30 Desa	100%
6	4		Pembinaan Lomba Lumbung Pangan tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Jumlah desa yang mendapat pembinaan persiapan penilaian kelembagaan lumbung pangan	3 Desa	- Desa	- Desa	- Desa	0%	-	3 Desa	-

6	5		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah ASN Dinas PMD yang melakukan monev peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	15 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	-	15 Orang	-
7			Program penguatan dan kelembagaan masyarakat									
7	1		Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Kabupaten dan Nasional	Tingkat partisipasi gelaran TTG Nasional	100%	100%	1 1	1 1	100%	100%	100%	100%
7	2		Bursa Inovasi Desa	Jumlah pemanfaatan TTG di Perdesaan	527 Kelompok	- Kelompok	- Kelompok	- Kelompok	0%	527 kelompok	527 Kelompok	100%
7	3		Sosialisasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pos pelayanan teknologi di Kabupaten Bombana	10 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	-	10 Unit	-
7	4		Lomba/ Sayembara Inovasi Teknologi Tepat guna tingkat kecamatan dan Kabupaten	Jumlah inovator di Kabupaten Bombana	10 Orang	3 Orang	10 Orang	3 Orang	30%	3 orang	10 Orang	100%
7	5		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Jumlah BUMDesa yang aktif	25 Kelompok	- Kelompok	- Kelompok	- Kelompok	0%	-	25 Kelompok	-
7	6		Penganugerahan Sikompak Award tingkat Kabupaten	Jumlah DAPM aktif	22 Kelompok	18 Kelompok	- Kelompok	- Kelompok	0%	22 lembaga	22 Kelompok	91%
7	6		Rapat koordinasi kelembagaan masyarakat desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang terkait daam pemberdayaan masyarakat	165 Kelompok	- Kelompok	- Kelompok	- Kelompok	0%	-	165 Kelompok	-
7	6		sosialisasi pembentukan kerjasama antar desa	Jumlah kerjasama antar desa dalam satu kabupaten	22 Kelompok	- Kelompok	- Kelompok	- Kelompok	0%	-	22 Kelompok	-
8			Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa									
8	1		pembinaan dan evaluasi kegiatan usaha ekonomi masyarakat di Desa	Jumlah masyarakat desa yang dapat mengakses pinjaman modal usaha dari BUMDesa	500 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	500 Orang	500 Orang	100%
8	2		Bantuan Pembangunan Kantor BUM Desa	Jumlah Kantor BUM Desa yang telah dibangun di Desa	6 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	-	6 Unit	-
8	3		Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan	Jumlah jenis usaha kecil masyarakat yang dibantu permodalannya melalui pinjaman dari BUMDesa maupun swasta	15 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	15 Unit	15 Unit	100%
9			Program pengembangan produk unggulan di Desa									
9	1		Fasilitasi pemetaan dan pengembangan produk unggulan desa	Jumlah Desa yang mengembangkan 1 jenis produk unggulan desa	30 Desa	- Desa	- Desa	- Desa	0%	-	30 Desa	-
10			Program Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa									
10	1		Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang telah mengikuti Pelatihan	540 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	-	540 Orang	-
10	2		Penyusunan database tingkat perkembangan desa	Jumlah Desa dengann kategori Desa Berkembang	30 Desa	- Desa	- Desa	- Desa	0%	-	30 Desa	-
10	3		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak	Jumlah Desa yang melakukan Pemilihan Kepala Desa Serentak	16 Desa	- Desa	16 Desa	16 Desa	100%	16 Desa	16 Desa	100%
10	4		Fasilitasi kebijakan asuransi kepala desa, aparat desa, KPMD dan Pelayan Masyarakat	Jumlah Kepala Desa dan Aparat Desa, KPMD dan Pelayan Masyarakat yang memiliki asuransi keselamatan kerja	750 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	750 orang	750 Orang	100%
10	5		intervensi kebijakan operasional tenaga perawat desa	Jumlah Desa yang mengalokasikan honorarium perawat desa di APB Desa	121 Desa	102 Desa	102 Desa	102 Desa	100%	121 Desa	121 Desa	100%
10	6		intervensi kebijakan operasional Anggota LINMAS Desa	Jumlah Desa yang mengalokasikan honorarium anggota LINMAS desa di APB Desa	60 Desa	- Desa	- Desa	- Desa	0%	60 Desa	60 Desa	100%
10	7		Pembinaan Implementasi Sistem Keuangan Desa	Jumlah desa yang menerapkan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa	121 Desa	121 Desa	121 Desa	121 Desa	100%	121 Desa	121 Desa	100%
10	8		Rapat koordinasi Kepala Desa	Persentase program dan kegiatan desa yang disinkronisasi dengan kebijakan kabupaten	100%	100%	1 1	1 1	100%	100%	100%	100%

11		Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga									
11	1	Pembinaan organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah PKK Aktif	166 Kelompok	166 Kelompok	166 Kelompok	166 Kelompok	100%	166 Organisasi	166 Kelompok	100%
11	2	Pelaksanaan Jambore PKK	Jumlah PKK Aktif	166 Kelompok	166 Kelompok	166 Kelompok	166 Kelompok	100%	166 Organisasi	166 Kelompok	100%
11	3	Bimbingan Teknis Anggota PKK	Jumlah kader PKK yang memahami pelaksanaan 10 program pokok PKK	60 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	60 Orang	100%
11	4	Temu Kader PKK Kabupaten	Persentase capaian pelaksanaan 10 program pokok PKK	80%	75%	0,75	0,75	100%	80%	80%	100%
11	5	Penyelenggaraan PKK Kabupaten	Persentase capaian pelaksanaan 10 program pokok PKK	80%	75%	0,75	0,75	100%	80%	80%	100%
11	6	Pembinaan lomba 10 program PKK	Jumlah desa yang mendapat pembinaan lomba 10 program PKK	3 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	100%	1 Desa	3 Desa	100%
12		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar di Desa									
12	1	Pembangunan jaringan listrik desa	tersedianya jaringan listrik di desa	6 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	-	6 Unit	-
12	2	Pembangunan fasilitas sumber air desa	tersedianya fasilitas sumber air di desa	10 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	-	10 Unit	-
12	3	Pembangunan gedung posyandu desa	tersedianya gedung posyandu di desa	3 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	-	3 Unit	-
12	4	Bantuan perpustakaan desa	tersedianya perpustakaan di desa	30 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	-	30 Unit	-
Rata-Rata Tingkat Capain Kinerja								51,53%			98,27%

Rumbia, Februari 2023

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Bombana,



M. HADI RAHARJO PUTRA, S.IP

Pembina, IV/a

NIP. 19860907 200701 1 001

Lampiran. 3.1
Usulan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bombana

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Lokasi
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						Tahun 2023		Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(26)
			X														
Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel																	
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun Kabupaten									Point	0,75	0,78	3.999.997.870	0,8	3.705.033.757	
			2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
			2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	meningkatnya penataan desa yang dilakukan	Persentase penataan desa yang dilakukan	%	0,83	0,83	250.000.000	0,83	250.000.000	
			2	13	02	201		Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya penataan desa	Jumlah penataan desa yang dilakukan	Desa	1	1	250.000.000	1	250.000.000	
			2	13	02	201	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	1	1	250.000.000	1	250.000.000	
			2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	meningkatnya kepatuhan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan kategori Desa Maju	%	14,88	20,66	405.000.000	28,93	405.000.000	

			2	1	0	20		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa dengan dengan kategori Desa Maju	Desa	18	25	405.000.000	35	405.000.000	
			2	1	0	20	0	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	85.000.000	1	85.000.000	
			2	1	0	20	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	121	121	180.000.000	121	180.000.000	
			2	1	0	20	0	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	815	30	45.000.000	30	45.000.000	
			2	1	0	20	0	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	
			2	1	0	20	0	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	121	0	-	0	-	
			2	1	0	20	1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	108	30	45.000.000	30	45.000.000	
			2	1	0	20	1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	
			2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa	Persentase Lembaga Pemberdayaan dan Lembaga Masyarakat Desa Aktif	%	54,4	55	550.000.000	57	550.000.000	

			2	1	0	20		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat aktif	Lembaga	952	972	550.000.000	992	550.000.000	
			2	1	0	20	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	121	20	100.000.000	20	100.000.000	
			2	1	0	20	0	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	450.000.000	1	450.000.000	
			2	1	0	20	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	70.000.000	1	70.000.000	
			2	1	0	20	0	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	

			2	1	0	20	0	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Tim Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Tim Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD	Hasil evaluasi SAKIP Dinas PMD Oleh Inspektorat									Predikat	65	70	3.044.997.870	75	2.750.033.757	
			X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	%	100	100	3.044.997.870	100	2.750.033.757	
			X	X	0	20		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	Dokumen	8	7	87.000.000	7	87.000.000	
			X	X	0	20	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	25.000.000	2	25.000.000	
			X	X	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	12.000.000	1	12.000.000	
			X	X	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	12.000.000	1	12.000.000	
			X	X	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	
			X	X	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	

										DPA-SKPD						
			X	X	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	28.000.000	1	28.000.000
			X	X	0	20		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	1.528.141.870	100	1.668.927.757
			X	X	0	20	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	210	210	1.407.858.870	210	1.548.644.757
			X	X	0	20	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	101.783.000	12	101.783.000
			X	X	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	3	8.500.000	3	8.500.000
			X	X	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000
			X	X	0	20		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	%	100	100	8.000.000	100	8.000.000

			X	X	0	20	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	8.000.000	12	8.000.000	
			X	X	0	20		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	68.000.000	100	68.000.000	
			X	X	0	20	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	35	35	38.000.000	35	38.000.000	
			X	X	0	20	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	3	30.000.000	3	30.000.000	
			X	X	0	20		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	285.716.000	100	285.716.000	
			X	X	0	20	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	27.416.000	1	27.416.000	
			X	X	0	20	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	8.500.000	1	8.500.000	
			X	X	0	20	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang isediakan	Dokumen	84	84	17.800.000	84	17.800.000	
			X	X	0	20	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	12.000.000	1	12.000.000	
			X	X	0	20	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	66	66	220.000.000	66	220.000.000	
			X	X	0	20		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	768.750.000	100	333.000.000	
			X	X	0	20	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	11	1	40.000.000	1	40.000.000	

										isediakan									
			X	X	0	20	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	550.000.000	0	-			
			X	X	0	20	0	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	15	8.250.000	1	4.500.000			
			X	X	0	20	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	27	2	19.000.000	1	8.500.000			
			X	X	0	20	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	-	1	199.000.000			
			X	X	0	20	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1	150.000.000	1	75.000.000			
			X	X	0	20	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	2	1.500.000	1	6.000.000			
			X	X	0	20		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	171.440.000	100	171.440.000			
			X	X	0	20	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	10.280.000	12	10.280.000			
			X	X	0	20	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	27.960.000	12	27.960.000			
			X	X	0	20	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	133.200.000	12	133.200.000			
			X	X	0	20		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang	Unit	26	26	127.950.000	26	127.950.000			

									daerah	dipelihara/direhabilitasi							
			X	X	0	20	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	85.000.000	3	85.000.000
			X	X	0	20	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	6.000.000	15	6.000.000
			X	X	0	20	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	33.450.000	1	33.450.000
			X	X	0	20	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	3.500.000	7	3.500.000

Rumbia, Februari 2023

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Bombana,



M. HADI RAHARJO PUTRA.S.IP

Pembina, IV/a

NIP. 19860907 200701 1 001

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOMBANA TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN				TARGET
		I	II	III	IV	
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	-	0,8	-	-	0,8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PMD oleh Inspektorat	-	-	BB	-	BB

Mengetahui,
Kepala Dinas PMD Kab. Bombana



M. Hadi Raharjo Putra, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19860907-200701 1 001

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
		I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	P	P	P	P	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	(59.506.400)	Kegiatan Rutin Triwulanan
2	Pembinaan Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa	P	P	P	P	30 Desa	30 Desa	30 Desa	31 Desa			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	(169.740.400)	Januari - Desember 2022
3	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	P	-	-	-	121 Orang	-	-	-			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	(389.755.500)	Maret 2022
4	Pemilihan Kepala Desa	P	-	-	-	109 Desa	-	-	-			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	(3.231.440.000)	Januari - Maret 2022
5	Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2021	P	-	-	-	121 Desa	-	-	-			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	(-)	-

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
		I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	P	P	P	P	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	(59.506.400)	Kegiatan Rutin Triwulanan
2	Pembinaan Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa	P	P	P	P	30 Desa	30 Desa	30 Desa	31 Desa		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	(169.740.400)	Januari - Desember 2022	
3	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	P	-	-	-	121 Orang	-	-	-		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	(389.755.500)	Maret 2022	
4	Pemilihan Kepala Desa	P	-	-	-	109 Desa	-	-	-		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	(3.231.440.000)	Januari - Maret 2022	
5	Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2021	P	-	-	-	121 Desa	-	-	-		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	(-)	-	
6	Bimbingan Teknis pengurus TP- PKK Kabupaten	P	-	-	-	-	20 Orang	-	-		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(130.000.000)	Maret 2022
7	Pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan/ Kelurahan dan Desa	P	P	P	P	41 Desa	42 Desa	42 Desa	42 Desa		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	(1.072.938.750)	Januari - Desember 2022	

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOMBANA TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN				TARGET
		I	II	III	IV	
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	-	0,9	-	-	0,9
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PMD oleh Inspektorat	-	-	A	-	A

Mengetahui,
Kepala Dinas PMD Kab. Bombana



M. Hadi Raharjo Putra, S.IP

Pembina, IV/a

NIP. 19860907-200701 1 001

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
		I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	P	P	P	P	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	(268.700.000)	Kegiatan Rutin Triwulanan
2	Pembinaan Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa	P	P	P	P	30 Desa	30 Desa	30 Desa	31 Desa			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	(124.800.000)	Januari - Desember 2023
3	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	P	-	-	-	121 Orang	-	-	-			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	(84.989.000)	Maret 2023
4	Pemilihan Kepala Desa	P	-	-	-	109 Desa	-	-	-			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	(-)	Januari - Maret 2023
5	Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2021	P	-	-	-	121 Desa	-	-	-			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	(25.205.000)	Maret 2023

6	Pembinaan BUMDesa	P	P	P	P	50 Desa	5 Org	5 Org	5 Org			Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa	(40.755.000)	Desa
7	Penetapan Batas Desa	P	P	P	P	25 Desa	10 Org	10 Org	10 Org			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan batas Desa	(249.664.000)	Desa
8	Bimbingan Teknis pengurus TP-PKK Kabupaten	P	-	-	-	-	38 Orang	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(456.000.000)	Maret 2023
9	Pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan/ Kelurahan dan Desa	P	P	P	P	10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	(744.000.000)	Januari - Desember 2023
10	Pembinaan Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	P	P	P	P	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	(25.234.000)	Desa

Rumbia, Februari 2022

Mengetahui
Kepala Dinas PMD Kab. Bombana



M.HADI RAHARJO PUTRA S..IP
PEMBINA, IV/a
Nip.19860907 200701 1 001

Nama OPD : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)**